KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

**Judul** : Ringankan beban rakyat miskin, DPR desak tunggakan iuran BPJS kesehatan dihapus
**Tanggal** : Kamis, 11 Juni 2026
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka
**Halaman** : 3

## Ringankan Beban Rakyat Miskin

# DPR Desak Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Dihapus

**Senayan meminta Pemerintah segera merealisasikan kebijakan penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan (BPJK-Kes) bagi masyarakat miskin dan rentan miskin.**

ANGGOTA Komisi IX DPR Nurhadi mengatakan, Negara perlu hadir memberikan solusi bagi masyarakat yang kehilangan akses layanan kesehatan akibat tunggakan iuran. "Jangan sampai mereka sakit kemudian tidak bisa memperoleh layanan kesehatan hanya karena terjebak tunggakan yang secara ekonomi tidak sanggup dibayar," kata Nurhadi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Sebelumnya, Pemerintah berencana menghapus tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) senilai Rp 14 triliun. Kebijakan pemutihan ini diperkirakan menyasar sekitar 23 juta peserta BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia.

Selain itu, Nurhadi mengingatkan Pemerintah agar tidak menjadikan kenaikan iuran sebagai solusi utama dalam mengatasi tekanan keuangan Program JKN. Pasalnya, kondisi ekonomi masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih dan masih menghadapi berbagai tekanan biaya hidup.

Dia menilai, saat ini bukan momentum yang tepat untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Ketika masyarakat masih menghadapi tekanan ekonomi, Pemerintah harus lebih dahulu membenahi tata kelola sistem. Seperti memperkuat pengawasan terhadap *fraud* (penipuan), meningkatkan kepatuhan badan usaha, dan memperbaiki efisiensi pembiayaan kesehatan.

Nurhadi menambahkan, keberlanjutan Program JKN harus ditopang oleh kebijakan yang berpihak kepada rakyat sekaligus menjaga kesehatan fiskal BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, Pemerintah perlu menyusun skema yang adil agar masyarakat miskin tidak kehilangan hak dasar atas pelayanan kesehatan.

Ia menegaskan, JKN adalah instrumen perlindungan sosial yang sangat penting. Jangan sampai jutaan masyarakat paling membutuhkan tidak bisa akses layanan kesehatan karena persoalan administrasi dan tunggakan. "Negara harus hadir memberikan jalan keluar," tandas politikus Nasdem ini.

Namun demikian, ia memuji capaian Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah menjangkau sekitar 284 juta jiwa atau hampir 99 persen penduduk Indonesia. Tapi di balik angka tersebut masih terdapat persoalan besar terkait keaktifan peserta. "Peserta aktif hanya sekitar 229 juta jiwa atau 80,64 persen dari total peserta," ungkap dia.

Artinya, ada sekitar 55 juta peserta yang tidak aktif karena berbagai faktor, mulai dari tunggakan iuran, mutasi data, hingga penonaktifan peserta bantuan iuran. "Ini menunjukkan kepemilikan kartu JKN belum sepenuhnya berbanding lurus dengan akses nyata terhadap layanan kesehatan," imbuh legislator asal Jawa Timur (Jatim) ini.

Sementara, anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago menyoroti kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang mengalami defisit hingga Rp 2 triliun per bulan. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan pembiayaan layanan kesehatan nasional. "Persoalan utama yang perlu segera dibenahi adalah akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)," desak Irma di Jakarta, Rabu (10/6/2026). ■ TIF